PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

UNIT KERJA : **INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

SUB UNIT KERJA : **BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJA SAMA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG DWI SUSILO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **424251**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 296.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/36 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/308 m2 di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 61.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 101.850.000**

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.250.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000
3. MOBIL, VOLKSWAGEN SEDAN Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
4. MOTOR, VESPA SPM/SCOOTER Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 3.850.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
6. MOBIL, HYUNDAI MATRIX MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 9.050.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 128.867.273**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**536.367.273**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**68.333.333**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**468.033.940**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.